

### **BAB III**

## **FUSI DAN KEBIJAKAN ORDE BARU TERHADAP POLITIK ISLAM, 1973 M -1998 M**

#### **A. Kebijakan Peleburan Partai Politik**

Istilah Orde Baru sesungguhnya mengandung bias yang ganda. *Pertama*, mengasumsikan Orde Lama sebagai masa lalu yang buruk. *Kedua*, istilah tersebut bersifat ahistoris, sehingga lahirnya Orde Baru dianggap lebih baik dari periode sebelumnya.<sup>48</sup>

Pemahaman yang demikian tentu akan menyudutkan kepemimpinan Orde Lama dan menguntungkan Orde Baru. Padahal Orde Lama telah memberikan kontribusi yang baik untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada juga yang menganggap Orde Baru mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan rezim Orde Lama. Orde Baru berbeda dengan Orde Lama dalam banyak hal. Dalam kaitan ini banyak timbul pembicaraan dalam masyarakat mengenai kelebihan-kelebihan Orde Baru dan sebaliknya banyak pula pembicaraan yang memojokkan Orde lama. Jadi jangan heran ketika kita mengamati sejarah di masa Orde Baru banyak sekali pemikiran yang menyudutkan akan Orde Lama.

Perbedaan antara Orde Lama dan Orde Baru adalah sesuatu yang amat jelas dan permasalahan antara keduanya dalam beberapa hal juga cukup jelas. Hal ini sering diabaikan, karena adanya pemikiran bahwa Orde Baru adalah alternatif yang

---

<sup>48</sup>Syamsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, (Jakarta: PT Grasindo, 1991), h. 3

jauh lebih baik dari Orde Lama. Persamaan yang mencolok antara keduanya terletak pada Undang-Undang Dasar dan dasar negara yang digunakan. Yang membedakan antara keduanya adalah pelaksanaan dan penafsiran terhadap kedua hal tersebut.<sup>49</sup>

Persamaan lain yang sering kurang disadari antara Orde Lama dan Orde Baru adalah pandangan tentang perlunya penyederhanaan sistem kepartaian. Jika dilihat dari sejarah Indonesia, kebijakan fusi partai sebenarnya telah dirintis oleh pemerintah Soekarno dengan cara menyederhanakan jumlah partai. Kebijakan Soekarno saat itu dapat dilihat sebagai jawaban atas reaksi ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik liberal yang dianggap telah banyak menimbulkan “kegaduhan”. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Soekarno dalam upaya penyederhanaan partai politik adalah membubaran Masyumi dengan Keppres No. 200 tahun 1960 dan PSI dengan Keppres No. 201 tahun 1960. Kemudian, Presiden Soekarno mengeluarkan Keppres No. 128 Tahun 1961 dan Keppres No. 129 Tahun 1961.<sup>50</sup> Keppres No. 128 Tahun 1961 mengakui bahwa 8 (delapan) partai politik di Indonesia, yaitu: Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, Partai Syariat Islam Indonesia (PSII) dan IPKI. Sementara itu, Keppres No. 129 Tahun 1961 menolak mengakui beberapa partai politik, antara lain: PSII Abikusumo, Partai Rakyat Nasional Bebas Daeng Latto, dan Partai Rakyat Nasional Djodi

---

<sup>49</sup>Alfian dan Najaruddin Sjamsuddin, *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1998), h. 37

<sup>50</sup>Lukman Hakiem, *Biografi Mohammad Natsir Kepribadian, Pemikiran, dan Perjuangan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 468

Gondokusumo. Oleh karena itu, dari sekitar 30-an partai politik dalam kontestasi tahun 1955 M, kemudian pada pemilu tahun 1960 M-1966 M dikerucutkan menjadi 10 partai.<sup>51</sup>

Akan tetapi, Orde Baru dipandang lebih berhasil, karena tinggal meneruskan kebijakan yang sudah ada serta lebih mampu menciptakan berbagai perangkat kekuasaan yang lebih canggih. Di samping itu, Orde Baru mampu merumuskan strategi politik yang tepat, sehingga Pemilu 1971 M menjadi semacam barometer politik Orde Baru untuk keberhasilan selanjutnya. Kondisi semakin melemahnya partai politik pasca Pemilu 1971 M memuluskan proses ke arah fusi. Persiapan matang itu tampak dari strategi politik Orde Baru yang menurut Ali Murtopo ditempuh melalui delapan tahapan.<sup>52</sup> Tahap pertama adalah penghancuran PKI. Tahap kedua, konsolidasi pemerintah dengan pemurnian Pancasila. Tahap ketiga, menghapuskan dualisme kepemimpinan. Tahap keempat, mengembalikan kestabilan politik dan merencanakan pembangunan. Tahap kelima, Pemilu 1971. Tahap keenam, penyederhanaan kepartaian. Tahap ketujuh, Sidang Umum MPR 1973 dan tahap kedelapan menyusun strategi kabinet pembangunan kedua. Seluruh tahapan itu diarahkan untuk mencapai pembaharuan politik, dan fusi partai dianggap cara yang paling efektif mengurangi jumlah partai.

---

<sup>51</sup>Andreas Pandiangan, *Pengantar Ilmu Politik: Suatu Pengantar*, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2017), h. 69

<sup>52</sup>Valina Singka Subekti, *Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elite*, ( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 75

Sementara itu, fusi itu sendiri bertujuan untuk *pertama*, mengganti lembaga-lembaga politik lama, khususnya partai politik dengan lembaga politik baru. Partai-partai politik lama didorong untuk membentuk partai politik baru. Sedangkan Sekretariat Bersama Golkar memperkarsai pembentukan wadah barunya bernama Golkar (Golongan Karya).<sup>53</sup> Penyederhanaan kepartaian atau fusi partai politik yang sebenarnya lanjutan dari kebijakan Soekarno juga semakin memperlihatkan bahwa, baik Soekarno maupun Soeharto sama-sama tidak menyukai partai politik yang terlalu banyak. Partai politik dengan kekuatan mobilisasi massanya dianggap sebagai faktor instabilitas politik dan dikhawatirkan mengganggu pelaksanaan program-program pembangunan. Begitu tidak sukanya Soeharto terhadap partai politik sehingga tidak perlu menegaskan eksistensi partai sebagai sebuah simbol yang melegitimasi berjalanya demokrasi sekaligus menjustifikasi pemerintahannya.

Presiden Soekarno adalah penganjur utama bagi adanya penyederhanaan kepartaian pada masa Orde Lama. Soekarno berpikir bahwa ketidakstabilan politik bersumber pada banyaknya jumlah partai politik. Bila kestabilan politik diinginkan, maka jumlah partai politik harus dikurangi. Artinya ide tentang perlunya fusi partai bukanlah sesuatu hal yang baru dalam sejarah politik Indonesia modern. Kebijakan fusi ini sudah menjadi teori yang dihasilkan oleh Soekarno, dan tidak salah jika diikuti oleh pemerintah Soeharto di Orde Baru dengan gaya yang sedikit berbeda.

---

<sup>53</sup>Valina Singka Subekti, *Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elite*, h. 74-75

Namun, Orde Baru bagi pemerintah Soeharto dilahirkan sebagai reaksi sekaligus koreksi total atas segala bentuk penyelewengan Orde Lama. Orde Baru dianggap sebagai era yang benar-benar baru, yang bebas dari persaingan ideologis Orde Lama.<sup>54</sup> Menurut Ridwan Saidi, ketika Indonesia dipimpin oleh Soekarno, memang tidak ada ideologi tunggal yang diwajibkan oleh negara pada masa itu, sehingga terjadi berbagai persaingan serta konflik yang didasarkan pada masalah ideologi.<sup>55</sup>

Perlu juga kita pahami, bahwa persoalan Orde Baru adalah persoalan krisis yang diwarisi oleh rezim sebelumnya. Ini menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan. Di bidang ekonomi terjadi kemerosotan dan stagnasi. Pada tahun 1966 bahkan laju inflasi mencapai 650%. Sementara itu, di bidang politik terjadi pula ketidakstabilan karena pertentangan antar kelompok-kelompok politik dalam masyarakat. Untuk mengatasi dua krisis ini, pemerintah mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi berupa pembangunan ekonomi yang berorientasi keluar. Dalam bidang politik, diupayakan menciptakan format politik yang mendukung pembangunan ekonomi. Sehingga rumusnya apabila pembangunan ekonomi bisa tercapai, maka partai politik harus terlebih dahulu tertib.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Syamsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, h. 6

<sup>55</sup>Ali Akbar dan Ridwan Saidi, *Biografi Politikus dan Budayawan Ridwan Saidi*, (Jakarta: Yayasan Renaissance, 2018), h. 29-30

<sup>56</sup>Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru 1966-1994*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 186

Orde Baru tampil dengan slogan *Politik no, ekonomi yes*.<sup>57</sup> Ini semua di lontarkan karena wacana Orde Lama dan gerakan politik Orde Lama begitu dominan dalam percaturan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah Orde Baru menciptakan pemikiran-pemikiran tandingan yang lebih menekankan pada ide-ide pragmatik, deideologisasi, deparpolisasi, program *oriented* dan sebagainya. Jadi, jangan heran ketika Orde Baru dikatakan sebagai rezim yang kebijakannya bertolak belakang dengan Orde Lama.

Ketika rezim Soeharto mulai menjalankan misinya, secara perlahan pemerintah Orde Baru berupaya menata kehidupan pemerintah Indonesia dengan menyingkirkan unsur-unsur pimpinan Soekarno di masa Orde Lama. Setelah tersingkir, Soeharto mulai membentuk pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan daerah terlebih dahulu, menciptakan stabilitas dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Keinginan pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan secara otoriter tanpa menghiraukan segenap kepentingan rakyat Indonesia serta nilai-nilai demokrasi. Salah satunya adalah penyederhanaan partai-partai politik.<sup>58</sup> Soeharto melihat bahwa biang kekacauan yang mengganggu stabilitas politik, antara lain adalah partai politik (Parpol). Parpol dianggap berperan mengganggu stabilitas. Hal ini berdasarkan pengalaman Demokrasi Parleментар dimana pemerintah selalu berganti-ganti

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 188

<sup>58</sup> Ali Akbar dan Ridwan Saidi, *Biografi Politikus dan Budayawan Ridwan Saidi*, h. 28

diakibatkan oleh partai politik. Dari sinilah kemudian muncul ide untuk membuat kebijakan fusi partai versi Soeharto.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto atas hal tersebut dengan memberi kebijakan penggabungan parpol, yang kita kenal dengan kebijakan fusi. Hal ini kemudian direvisi oleh Soeharto pada masa kepemimpinannya dengan cara yang lebih halus dan lebih memilih cara yang lunak dan persuasif dengan berterus terang melakukan kebijakan fusi partai. Wacana untuk menggabungkan atau menyederhanakan partai politik sebenarnya telah direncanakan sejak tahun 1966. Fusi partai dilandasi oleh Sidang MPRS IV, tahun 1966 dengan TAP No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaannya. TAP MPR tersebut menetapkan bahwa pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR segera membuat Undang-Undang yang mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaannya yang menuju kepada penyederhanaan.<sup>59</sup> Soeharto telah mewarisi pemikiran tentang perlunya penyederhanaan kepartaian tersebut. Jumlah partai politik yang 10, dianggap masih terlalu banyak. Oleh karena itu, fusi partai politik adalah suatu keharusan. Hal tersebut benar-benar diterapkan pada tahun 1973 M.

Pada tahun 1973 M terjadi sebuah peristiwa sejarah yang berkaitan dengan parpol. Pemerintah Soeharto memberikan kebijakan menyangkut dengan penyederhanaan parpol atau fusi. Sebanyak sembilan parpol yang ada difusikan menjadi dua, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi

---

<sup>59</sup>Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), h. 204-205

Indonesia (PDI) serta Golongan Karya (Golkar). PPP dideklarasikan oleh DR. K.H. Idham Chalid sebagai Ketua Umum PBNU, Mohammad Syafaat Mintaredja sebagai Ketua Umum PARMUSI, H. Rusli Halil Ketua Umum dari PERTI dan H. Masjkur sebagai Ketua kelompok Persatuan Pembangunan di DPR. PPP yang telah didirikan kemudian dipimpin oleh Mohammad Syafaat Mintaredja sebagai ketua umum pertama PPP dari golongan PARMUSI. Sementara itu, PDI dinyatakan sah pendiriannya setelah prinsip-prinsip dasar yang tertulis dalam deklarasi pembentukan PDI ditandatangani oleh ketua dan sekretaris masing-masing partai yang berfusi pada 10 Januari 1973 M. Para penandatangan itu adalah Mohamad Isnaeni dan Abdul Madjid (PNI), A. Wenas dan Sabam Sirait (Parkindo), Ben Mang Reng Say dan F.S. Wignjosumarsono (Partai Katolik), Akhmad Sukarmadidjaja dan M. Sadrie (IPKI), serta Sugiarto Murbantoko dan John Pakan (Murba). Dengan deklarasi ini, bayi PDI telah lahir dari rahim lima partai yang dipaksa melakukan perkawinan silang dan tanpa adanya hubungan cinta sejati.<sup>60</sup>

Di samping itu, kebijakan fusi didasari oleh pemerintah Orde Baru yang mendukung penuh terhadap Golongan Karya. Pada waktu itu, Golongan Karya belum menjadi parti politik. Sebab, pada tahun itu istilah partai politik di kehidupan rakyat Indonesia dipandang buruk citranya, sehingga Golkar sebagai organisasi masyarakat mendapat peluang suara untuk memenangkan pemilu pada tahun-tahun berikutnya di masa Orde Baru. Jadi, siapa yang diuntungkan terhadap kebijakan fusi partai tentulah

---

<sup>60</sup>Idris Taha, *Islam dan PDI Perjuangan: Akomodasi Aspirasi Politik Umat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 47-48



Golongan Karya. Sebab, Golkar tidak tergabung dalam fusi yang ada dan Golkar adalah partainya pemerintah pada saat itu. Karena itu, Golkar tidak perlu repot-repot dalam menyatukan program dan visi misinya seperti yang dialami partai Islam dan nasionalis.

Melihat golongan Islam dan nasionalis, sebenarnya yang beruntung adalah golongan Islam jika dibandingkan dengan golongan nasionalis. Sebab, golongan Islam atau PPP memiliki ideologi yang sama yaitu berazaskan Islam, sehingga tidak perlu repot-repot untuk mengkondisikan lagi dalam hal ideologi. Hanya saja, PPP memiliki dua aliran pemikiran. *Pertama*, Pemikiran yang modernis dan *kedua*, pemikiran tradisional. kelompok “modernis” yang secara longgar ada pada Muslimin Indonesia (MI) atau PARMUSI, dan Serikat Islam (SI) atau PSII, dan kelompok “tradisional” yang relatif ada pada NU dan Perti.<sup>61</sup> Dengan adanya wadah yang menyatukan akan menjadi kekuatan yang besar dalam memenangkan kontestasi di pemilu yang akan datang.

Kebijakan tersebut direspon baik oleh partai-partai politik Islam. Pada kenyataannya partai-partai Islam masih belum cukup kuat untuk pencapaian yang memuaskan seperti partai Masyumi di masa Orde Lama. Oleh sebab itu, kebijakan fusi diharapkan menjadi wadah untuk bersatunya umat Islam dalam mewujudkan cita-cita umat Islam bersama melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kebijakan fusi ini juga adalah sebagai kekuatan bagi umat Islam. Sebab, ketika Masyumi terbentuk pada awal kemerdekaan, masih ada Perti yang masih

---

<sup>61</sup>Syamsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, h. 9

belum mau bergabung di dalamnya ada juga yang memandag kebijakan fusi tersebut adalah cara pemerintah untuk mengkubur partai-partai yang sudah ada dengan memaksa berfui. Dengan demikian, sejak pemilihan umum tahun 1977 hingga Pemilu 1997 kontestan politik yang berhak menikmati pesta demokras adalah PPP, PDI, dan Golkar.<sup>62</sup>

Akan tetapi, dalam perjalanannya PPP lebih dihadapkan dengan permasalahan konflik internal maupun eksternal. Sifat federasi yang dialami PPP mungkin menjadi salah satu pemicunya, sehingga membuat PPP tidak fokus dengan tujuan awalnya. PPP justru lebih fokus untuk mengurus konflik kepemimpinan. Akhirnya, partai yang berfusi banyak kehilangan suara dan kalah dengan Golkar. Lihat NU, yang sebelum fusi banyak mendapat dukungan, tetapi setelah berfusi dengan partai lain dalam PPP, ternyata kalah dengan Golkar. Konsep masa mengambang serta pengkaburan ideologi, yang dilakukan oleh Orde Baru sangat berhasil, sehingga secara subjektif internal, fusi ini ternyata dapat menggembosi kondisi internal partai. Di samping itu, partai juga kehilangan identitas asli ideologinya. Karena, pencampuran ideologi yang sebenarnya tidak sesuai dengan *Platform* partai, sejarah partai, dan latar belakang partai, sehingga kecenderungan fusi partai politik pada masa Orde Baru ini adalah sebuah cara halus untuk membubarkan suatu partai politik adalah benar. Setidaknya, menggembosi kekuatan partai politik

---

<sup>62</sup>Nurhamin Nahar Usman, *Percepatan dan Perlambatan Demokrasi di Tingkat Lokal*, (Jakarta: Elek Media Koputindo, 2015), h. 32

lawan Golkar, baik itu kekuatan ideologi, program, konsep maupun masa pendukung.<sup>63</sup>

Kebijakan fusi tersebut tentu mengandung muatan positif dan juga negatif. Bagi pemerintah dan Golkar, tentu ini menjadi muatan yang positif. Sebab, dengan kebijakan ini Golkar semakin tak terlampaui dan selalu memenangkan pemilu sepanjang Orde Baru. Namun, kebijakan ini menjadi muatan negatif bukan saja dari partai Islam, tetapi dari partai nasionalis juga. Terbukti dengan adanya intervensi yang berlebihan terhadap partai Islam maupun nasionalis yang dilakukan secara diktator dan tidak demokratis, sehingga dengan kebijakan ini bisa dipahami bahwa siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang sedang dibebankan kepadanya dipandang berhasil, walaupun kebijakan yang dilakukan dipandang kontroversial, ada yang mendukung dan ada yang tidak. Tapi hal yang perlu disampaikan adalah keberhasilan rezim Orde Baru membuat golongan umat Islam kecewa terhadap kebijakan-kebijakan selanjutnya, kita tau bahwa lahirnya Orde Baru disebabkan oleh adanya dukungan umat Islam. Akan tetapi di masa selanjutnya di tahun-tahun 1970-an golongan Islam termarginalkan.

## **B. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

---

<sup>63</sup>Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), h. 207-208

Telah kita ketahui bersama, bahwa Partai Persatuan Pembangunan -disingkat PPP- telah berkontribusi di bidang politik sejak 1973-sekarang. PPP didirikan pada 1973 sebagai hasil fusi politik empat partai Islam. Partai Islam tersebut adalah Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai fraksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itu wajar jika PPP memproklamirkan diri sebagai “rumah besar umat Islam.”

PPP didirikan oleh lima tokoh deklarator yang merupakan pimpinan empat partai Islam peserta pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok Persatuan Pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR seperti yang telah diuraikan di atas. PPP berazaskan Islam dan berlambangkan Ka’bah. Ide tersebut dikemukakan oleh tokoh KH. Bisri Syansuri seorang ulama yang sangat dihormati di PPP. Akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan azas Islam dan menggunakan azas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar I PPP tahun 1984, PPP secara resmi menggunakan azas Pancasila.<sup>64</sup> Setelah tumbangya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie, PPP kembali menggunakan azas Islam dan lambang Ka’bah Secara resmi hal itu dilakukan

---

<sup>64</sup>Abdurahman Syagaff, *Tips & Trik Menjadi Calon Legislatif Terpilih Dengan Mudah*, (Bekasi: Yayasan Indonesia Sehat Bahagia, 2013), h. 101

melalui Muktamar IV akhir tahun 1998. Walaupun PPP kembali menjadikan Islam sebagai azas, PPP tetap berkomitmen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar PPP yang ditetapkan pada Muktamar VII Bandung 2011 bahwa “tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah *Subhanahu Wata’ala*.”

Sejak kelahirannya, PPP sudah menempati posisi yang marginal dalam tatanan politik Orde Baru.<sup>65</sup> Bahkan, sesungguhnya dalam pengertian teoritis, PPP belum pernah menjadi “partai politik” karena hampir semua fungsi parpol diambil oleh birokrasi dan berbagai organisasi korporatis perpanjangan tangan Golkar.<sup>66</sup> Akibatnya, komunikasi politik dengan massa pendukungnya hanya terjadi pada saat pemilu.<sup>67</sup>

Ketua Umum DPP PPP yang pertama adalah H. Mohammad Syafaat Mintaredja, S.H. yang menjabat sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai 1978. H. Mohammad Syafaat Mintaredja lahir di Bogor pada 17 Februari 1921 M. Semasa muda, Mintaredja aktif di Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Bersama kawan-kawan Lafran Pane, Ahmad Tirtosudiro, M. Sanusi, dan lain-lain Mintaredja

---

<sup>65</sup>Syamsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, h. 148.

<sup>66</sup>*Ibid.*, h. 100

<sup>67</sup>Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru 1966-1994*, h. 235

mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berpusat di Yogyakarta.<sup>68</sup> Tokoh yang aktif di organisasi Muhammadiyah ini kemudian dipilih oleh Presiden Soeharto untuk memimpin PARMUSI, yang sebelumnya terdapat keributan antara Djarnawi Hadikusumo dengan Jaelani Naro. Dari jabatan Ketua Umum PARMUSI, Mintaredja diberikan kepercayaan untuk memimpin Partai yang baru lahir yakni PPP.

Selain jabatan Ketua Umum, pada awal berdirinya PPP juga mengenal presidium partai yang terdiri dari K.H. Idham Chalid sebagai Presiden Partai, H. Mohammad Syafaat Mintaredja, S.H., Drs. H. Th. Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masjkur, masing-masing sebagai Wakil Presiden. Jabatan Ketua Umum kemudian diberikan kepada H. J. Naro, S.H., setelah Mohammad Syafaat Mintaredja diberi amanat menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Turki.<sup>69</sup>

Ketua Umum yang kedua adalah H. Jaelani Naro, S.H. Jaelani Naro menjabat di PPP selama dua periode. Pertama tahun 1978 ketika H. Mohammad Syafaat Mintaredja mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun 1984. Dalam Muktamar itu Naro terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PPP. Jaelani Naro atau sering juga disebut John Naro lahir di Palembang Sumatera Selatan pada 3 Januari 1929.

Jaelani Naro merupakan tokoh yang sebenarnya bukan dari Masyumi, Muhammadiyah, ataupun NU. Tapi ia berasal dari Jamiatul Wasliah, organisasi Islam

---

<sup>68</sup>Berliana Kartakusumah, *Pemimpin Adiluhung Genealogi Kepemimpinan Kontemporer*, (Jakarta: Taraju, 2016), h. 198

<sup>69</sup><https://www.suaramuhammadiyah.id/2017/02/18/hms-mintaredja-sosok-politisi-muhammadiyah/> diakses pada tanggal 14 Februari 2020 jam 20:23

ragional di Sumatra. Naro adalah orang yang berhasil menggantikan kepemimpinan Djarnawi Hadikusumo dalam PARMUSI pada tahun 1970, lalu menerima kepemimpinan PPP dari H.M.S. Mintaredja.<sup>70</sup>

Ketua Umum DPP PPP yang ketiga adalah H. Ismail Hasan Metareum, S.H, yang menjabat sejak terpilih dalam Muktamar II PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar III tahun 1994.<sup>71</sup> H. Ismail Hasan Metarium adalah tokoh yang dingin dalam mengayomi teman-teman kader PPP.

Ketua Umum DPP PPP yang keempat adalah H. Hamzah Haz yang terpilih pada Muktamar IV tahun 1998 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar V tahun 2003. Hasil Muktamar V tahun 2003 juga menetapkan jabatan Wakil Ketua Umum Pimpinan Harian Pusat DPP PPP, yang dipercayakan Muktamar kepada mantan Sekjen DPP PPP, H. Ali Mawarman Hanan, S.H.<sup>72</sup>

Ketua Umum DPP PPP yang kelima adalah H. Suryadharma Ali yang terpilih dalam Muktamar VI tahun 2007 dengan Sekretaris Jenderal H. Irgan Chairul Mahfiz sedangkan Wakil Ketua Umum dipercayakan oleh Muktamar kepada Drs. H.A. Chozin Chumaidy. H. Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali menjadi Ketua Umum untuk masa bakti 2011-2015 melalui Muktamar VII PPP 2011 di Bandung.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Syamsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, h. 13

<sup>71</sup> <https://ppp.or.id/sejarah> diakses pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 20:21 WIB

<sup>72</sup> <https://ppp.or.id/sejarah> diakses pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 20:21 WIB

<sup>73</sup> <https://ppp.or.id/sejarah> diakses pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 20:21 WIB

PPP sudah mengikuti sebanyak enam kali sejak tahun 1977 sampai Pemilu dipercepat tahun 1999 dengan hasil yang turun naik; (1). Pada Pemilu 1977 PPP meraih 18.745.565 suara atau 29,29 persen. Sedangkan dari segi sisi perolehan kursi, PPP mendapat 99 kursi atau 27,12 persen dari 360 kursi yang diperebutkan; (2). Pada Pemilu 1982 PPP meraih 20.871.800 suara atau 27,78 persen. Dari perolehan kursi, PPP mendapatkan 94 kursi atau 26, 11 persen dari 364 kursi yang diperebutkan. (3). Pada Pemilu 1987 PPP meraih 13.701.428 suara atau 15,97 persen. Sedangkan dari perolehan kursi, PPP meraih 61 kursi atau 15,25 persen dari 400 kursi yang diperebutkan. (4). Pada Pemilu 1992 PPP meraih 16.624.647 suara atau 14,59 persen. Dari sisi perolehan kursi PPP meraih 62 kursi atau 15,50 persen dari 400 kursi yang diperebutkan. (5). Pada Pemilu 1997 PPP meraih 25.340.018 suara. Sedangkan dari sisi perolehan kursi, PPP meraih 89 kursi atau 20,94 persen dari 425 kursi yang diperebutkan. (6). Pada Pemilu 1999, PPP meraih 11.329.905 suara atau 10,71 persen. Dari sisi perolehan kursi , PPP meraih 58 kursi atau 12,55 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.<sup>74</sup>

Selama Pemilu yang diselenggarakan pemerintah otoriter Orde Baru, PPP selalu berada dalam keadaan tertindas. Kader-kader PPP dengan segala alat Orde Baru dipaksa meninggalkan partai, kalau tidak akan dianiaya. Kalau seniman, tokoh PPP itu tidak akan bisa “manggung” di TVRI, satu-satu stasiun televisi yang dikontrol pemerintah. Hal ini dialami oleh H. Rhoma Irama, Bajuri yang kini dikenal Mat Solar Sopir Bajaj, dan lain-lain. Selama masa Orde Baru banyak kader-kader

---

<sup>74</sup>Abdurahman Syagaff, *Tips & Trik Menjadi Calon Legislatif Terpilih Dengan Mudah*, h. 102



PPP dimanipulasi untuk kemenangan Golkar, mesin politik Orde Baru. jadi kalau ada yang menyatakan PPP adalah bagian dari Orde Baru sangat tidak beralasan.<sup>75</sup>

### **C. Prinsip Perjuangan PPP**

1. **Prinsip Ibadah:** PPP senantiasa berupaya mendasari perjuangannya dengan prinsip ibadah. Dalam arti seluas-luasnya yaitu untuk mencapai keridaan Allah SWT. Oleh karena itu, seluruh kegiatan berpolitik jajaran partai adalah merupakan keterpanggilan untuk beribadah.
2. **Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar.** PPP mendasari perjuangannya atas prinsip penyeru dan mendorong pelaksanaan perbuatan yang baik serta mencegah segala perbuatan yang tercela (munkar). Prinsip ini juga melandasi segala landasan perjuangan dalam melaksanakan fungsi untuk meyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan, dan membela aspirasi rakyat dan melaksanakan pengawasan atau kontrol sosial. Dengan prinsip ini PPP berusaha untuk mendorong budaya kritis dalam kehidupan masyarakat keseluruhan sehingga tidak terjadi pembusukan politik yang mengakibatkan kemungkaran yang lebih dalam pada tatanan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini juga menumbuhkan keberanian dalam menegakkan kebenaran.
3. **Perinsip Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan:** perjuangamn PPP selalu didasarkan pada penegakan dan pembelaan prinsip kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat. Perjuangan partai mengarah pada perlawanan terhadap kebatilan

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, h. 102-103

karena kebenaran berhadapan secara diametral dan kebatilan. Meskipun begitu kebenaran yang mutlak hanya Allah SWT yang maha benar. Karena itu sepanjang kebenaran itu masih bersifat manusiawi kebenaran itu bukanlah monopoli siapapun. Sementara itu, prinsip kejujuran atau amanah bersifat sentral dan esensial dalam perjuangan PPP. Dengan prinsip kejujuran ini perjuangan dalam bentuk apapun akan menjamin tegaknya saling pengertian, keharmonisan, keserasian dan ketentraman. Prinsip kejujuran merupakan penunaian amanah dari perbuatan yang mengkhianati amanah rakyat. PPP juga akan terus memepertahankan prinsip keadilan di dalam prinsip gerak langkah perjuangannya. Tegaknya keadilan adalah esensial dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan prinsip keadilan maka, segala aturan dapat terlaksana dan berjalan baik sehingga menimbulkan keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, ketentraman dan sekaligus akan menghilangkan kedzaliman, kesenjangan, keresahan, dan konflik.

4. **Prinsip Musyawarah:** PPP berpendirian bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai dan menjamin kemantapan hasilnya serta menumbuhkan tanggung jawab bersama sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Disamping itu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah SWT. Apabila dalam musyawarah tidak dicapai mufakat maka tidak

tertutup kemungkinan pengambilan keputusan ditempuh dengan suara terbanyak dengan mecegah munculnya diktator mayoritas.

5. **Prinsip Persamaan, Kebersamaan dan Persatuan:** PPP mendasarkan perjuangan atas dasar prinsip persamaan drajat manusia dihadapan Allah SWT. Ini adalah keyakinan yang mendasar, yang dapat memberikan motifikasi perjuangan kepada seluruh jajaran partai sehingga terhindar dari bahaya kaltus individu dan neo-feodalisme yang dapat memerosotkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. PPP berjuang untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan dan memikul beban dan tanggungjawab kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan secara proporsional sehingga terhindar dari dominasi, perasaan ditinggalkan, dan dikucilkan. Di samping itu, perjuangan PPP juga didasarkan atas prinsip menegakkan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga terhindar dari bahaya disintegrasi dan perpecahan.
6. **Prinsip Istiqomah:** PPP menjadikan prinsip istiqomah atau konsisten sebagai prinsip perjuangan. Artinya PPP sebagai institusi dan kader-kadernya harus gigih, kokoh, teguh pendirian dan selalu konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Atas dasar istiqomah sebagai nilai-nilai perjuangan partai, maka keberhasilan akan dapat ditegakkan dan kemantapan dalam perjuangan partai dalam konteks perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita nasional.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>[www.PPP.co.id](http://www.PPP.co.id)